

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu negara merupakan suatu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2013) pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perubahan pada struktur sosial, kelembagaan, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan ketimpangan, serta pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi menjadi perhatian utama bagi pemerintah guna mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan ekonomi di suatu wilayah merupakan suatu proses yang melibatkan peran pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, serta membangun kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang kerja baru serta mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Alfiatus, 2018).

Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada kenyataannya masih belum tercapai. Dalam pelaksanaannya, pembangunan di berbagai wilayah sering menimbulkan ketimpangan. Adanya pembangunan di suatu daerah harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dan setiap daerah harus dapat mengelola potensi atau kelebihan yang ada pada daerahnya terutama daerah tertinggal (Wulandari dan Rahmawati, 2022). Kesejahteraan ekonomi yang diukur melalui pemerataan pendapatan masyarakat masih menunjukkan ketidakseimbangan. Ketimpangan ini tidak mampu untuk dihilangkan, namun dapat dikurangi hingga tingkat yang mampu diterima suatu sistem sosial tertentu (Fattah et al., 2022). Oleh karena itu, isu ketimpangan pendapatan merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh

negara, baik negara berkembang maupun negara maju.



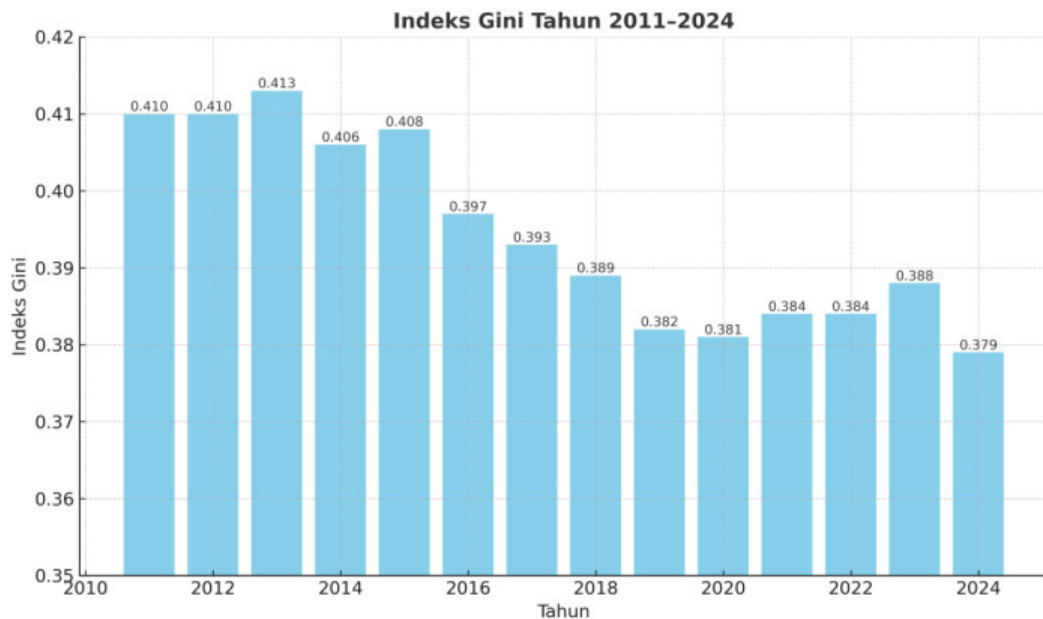
Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan perbedaan pendapatan masyarakat antar daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal (Adipuryanti dan Sudibia, 2015). Ketimpangan pendapatan dapat terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan di antara rumah tangga yang tidak merata pada suatu negara (Todaro dan Smith, 2013). Gagalnya upaya pemerataan distribusi pendapatan berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, yang pada akhirnya membuat pengentasan kemiskinan menjadi lebih sulit serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ini juga dapat memicu kecemburuan sosial yang berujung pada risiko serius seperti konflik sosial.

Meski peningkatan pendapatan per kapita di suatu daerah dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi, hal tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan pendapatan. Di negara berkembang, perekonomian cenderung lebih mengandalkan penggunaan modal daripada tenaga kerja. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kalangan, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan di antara berbagai golongan masyarakat ini diukur dan dihitung dengan koefisien gini atau *gini ratio* (Sjafrizal, 2017). Nilai koefisien gini berkisar antara nol (0) hingga satu (1), di mana nol menunjukkan distribusi yang sangat merata, sedangkan nilai satu menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi. Artinya, semakin tinggi nilai koefisien gini, semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan, dan sebaliknya, semakin rendah nilai tersebut, semakin merata distribusinya.

Dalam konteks nasional, ketimpangan pendapatan masih menjadi isu struktural yang dihadapi Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Meskipun perekonomian nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini tercermin dari fluktuasi nilai koefisien Gini yang menunjukkan bahwa pendapatan belum terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini menjadi ironi, mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sektor ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, hingga jasa yang seharusnya mampu meningkatkan inklusivitas ekonomi. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan cenderung dinikmati oleh kelompok tertentu saja, sementara sebagian



besar masyarakat lainnya belum merasakan dampak signifikan dari pertumbuhan tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1

Perkembangan Indeks Gini Indonesia Tahun 2011-2024 (Persen)

Indeks Gini di Indonesia pada periode 2011 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif, namun secara umum cenderung mengalami perbaikan dari sisi ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2011 dan 2012, Indeks Gini tercatat sebesar 0,410, kemudian sedikit meningkat menjadi 0,413 pada tahun 2013 yang menandakan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan. Memasuki tahun 2014, Indeks Gini mulai menurun menjadi 0,406 dan terus mengalami perbaikan bertahap hingga mencapai 0,382 pada tahun 2019.

Titik terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 0,381, yang bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, di mana kebijakan bantuan sosial, program perlindungan sosial, serta penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada penyempitan kesenjangan pendapatan sementara. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, Indeks Gini kembali meningkat tipis menjadi 0,384 dan stagnan pada tahun tersebut.



Tahun 2023 mencatat kenaikan menjadi 0,388, sebelum akhirnya menurun kembali pada tahun 2024 dengan nilai 0,379, yang merupakan nilai terendah selama periode penelitian ini. Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan sedang. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung membaik, upaya pemerataan distribusi pendapatan masih diperlukan untuk mencapai kategori ketimpangan rendah.

Todaro (2019) menjelaskan bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan ketimpangan di suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta karakter dari pertumbuhan tersebut (*economic character of economic growth*), meliputi cara mencapainya, siapa yang berpartisipasi, sektor-sektor yang diprioritaskan, dan lain sebagainya. Karakter pertumbuhan ini akan menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan standar hidup masyarakat miskin. Jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi pemerataan pembangunan, maka daerah yang tertinggal akan semakin rentan terhadap kemiskinan.

Sementara itu, Sukirno (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan aktivitas perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi isu penting dalam jangka panjang karena dari satu periode ke periode berikutnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan terus meningkat.

Selain itu, Febrianto (2017) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang dicapai disertai dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan pendapatan secara nasional mencerminkan adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kontribusi ekonomi antar sektor wilayah. Beberapa daerah mengalami percepatan pembangunan dan



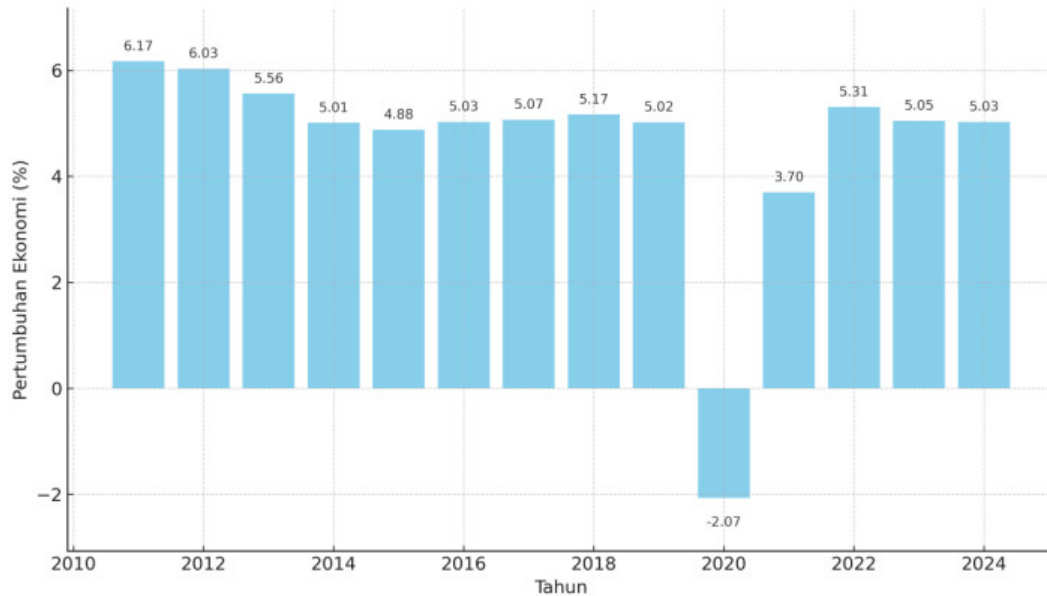
pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara daerah lainnya tertinggal dan tidak mampu mengimbangi laju perkembangan tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi di tingkat nasional belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Indonesia.

Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya disertai dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tersebut belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Teori Kuznets menjelaskan adanya hubungan berbentuk kurva-U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya memperbesar ketimpangan karena hanya segelintir kelompok masyarakat yang dapat menikmati hasil pembangunan, khususnya mereka yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan pendidikan. Namun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan yang bersifat inklusif, pemerataan pendapatan diharapkan akan tercapai. Dalam konteks Indonesia, fenomena pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diiringi pemerataan pendapatan perlu diteliti lebih dalam untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kontribusi pertumbuhan terhadap dinamika ketimpangan pendapatan.

Menurut Kanbur (2010), pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif merupakan pertumbuhan yang mampu memperluas pemerataan hasil pembangunan serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan semacam ini berperan penting dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Sehingga nantinya pertumbuhan inklusif ini mengatasi permasalahan pembangunan melalui prinsip peningkatan pertumbuhan (*pro-growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), dan penyeimbangan dalam ketimpangan (*pro-poor*).





Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.2, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang periode 2011 hingga 2024. Pada awal periode, pertumbuhan ekonomi nasional masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 6,17 persen pada tahun 2011 dan sedikit menurun menjadi 6,03 persen pada tahun 2012. Setelah itu, laju pertumbuhan mulai mengalami perlambatan secara bertahap, dengan angka yang terus menurun hingga mencapai 4,88 persen pada tahun 2015.

Pada periode 2016 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di kisaran 5 persen. Namun, pada tahun 2020, kondisi perekonomian nasional mengalami tekanan yang sangat berat akibat pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga -2,07 persen. Nilai ini menjadi yang terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir dan mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap hampir seluruh sektor ekonomi.

Memasuki tahun 2021, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat dengan pertumbuhan sebesar 3,70 persen, yang kemudian menguat menjadi 5,31 persen pada tahun 2022. Meski demikian, di tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi kembali sedikit melambat, masing-masing sebesar 5,05 persen dan 5,03 persen. Secara keseluruhan, meskipun perekonomian telah berhasil pulih



dari dampak pandemi, tingkat pertumbuhan ini masih belum sepenuhnya kembali pada level tinggi seperti di awal periode penelitian.

Beberapa penelitian empiris telah mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Sebagian penelitian, seperti yang dilakukan oleh Caesarisma (2023) menunjukkan adanya pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, dan sebaliknya. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Febriyani & Anis (2022), yang mengungkapkan hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Selain itu, beberapa studi lain seperti yang dilakukan oleh Arif & Wicaksani (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan salah satu variabel yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Inflasi sendiri diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dalam suatu perekonomian. Menurut Sukirno (2002), inflasi adalah sebuah proses kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum dan berkelanjutan. Kondisi ini dapat terjadi ketika terbukanya kesempatan kerja yang luas dan pesatnya perkembangan perekonomian menyebabkan peningkatan pengeluaran masyarakat. Sementara itu, produksi barang dan jasa belum mampu memenuhi lonjakan permintaan tersebut, sehingga akhirnya mendorong kenaikan harga di pasar.

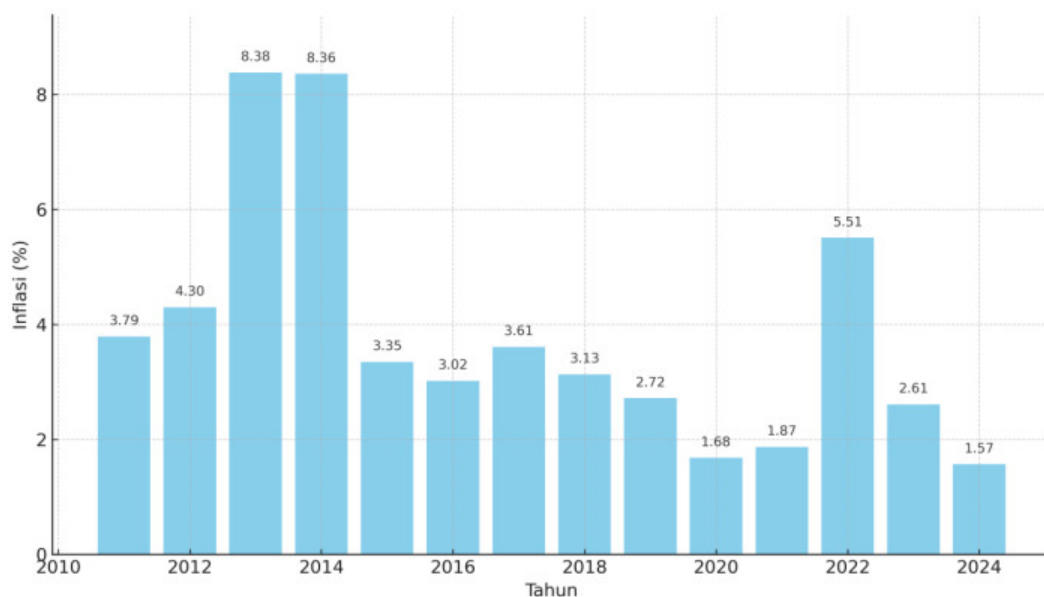
Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah inflasi. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan masyarakat meningkat, namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertumbuhan produksi barang dan jasa secara keseluruhan (Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Arsyad, 2004). Lonjakan inflasi yang terlalu tinggi, apabila tidak diimbangi dengan upaya pemerataan ekonomi, dapat memperburuk tingkat kemiskinan, meningkatkan pengangguran, menurunkan kesejahteraan masyarakat, serta memperlebar jurang ketimpangan pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), inflasi yang tinggi dan tidak terkendali paling berdampak pada kelompok berpenghasilan rendah, karena besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok. a, kelompok ini sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-



hari. Di sisi lain, kelompok berpendapatan tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi terhadap kondisi ini, karena mereka memiliki cadangan keuangan yang lebih besar dan akses terhadap aset yang nilainya bisa meningkat saat inflasi terjadi.

Dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan, inflasi yang tinggi cenderung memperlebar jarak antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akan lebih dirasakan dampaknya oleh kelompok berpendapatan rendah, karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga naik, daya beli mereka menurun, dan beban hidup semakin berat. Sebaliknya, kelompok berpenghasilan tinggi umumnya memiliki akses terhadap berbagai aset atau instrumen keuangan—seperti properti atau saham—yang nilainya justru bisa meningkat seiring inflasi. Kondisi ini membuat mereka lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi, bahkan di beberapa kasus justru diuntungkan, sehingga kesenjangan pendapatan semakin melebar.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3

Inflasi Indonesia Tahun 2011-2024 (Persen)



Berdasarkan Gambar 1.3, tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2011-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada awal periode, yaitu

tahun 2011, inflasi tercatat sebesar 3,79 persen dan meningkat menjadi 4,30 persen pada tahun 2012. Lonjakan paling tajam terjadi pada 2013 dan 2014, dengan tingkat inflasi masing-masing mencapai 8,38 persen dan 8,36 persen. Kenaikan signifikan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berdampak pada naiknya harga barang kebutuhan pokok, ditambah dengan tekanan eksternal berupa kenaikan harga pangan global.

Memasuki tahun 2015 hingga 2019, inflasi bergerak relatif stabil di kisaran 2 hingga 3 persen, menunjukkan terkendalinya harga-harga secara umum. Penurunan lebih tajam terjadi pada tahun 2020 ketika inflasi hanya mencapai 1,68 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa.

Tahun 2021 inflasi sedikit meningkat menjadi 1,87 persen seiring mulai pulihnya perekonomian, namun pada 2022 inflasi kembali melonjak cukup tinggi hingga 5,51 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat pasca pandemi serta tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dan pangan akibat konflik geopolitik. Setelah itu, inflasi kembali terkendali menjadi 2,61 persen pada 2023 dan mencapai titik terendah sepanjang periode ini, yaitu 1,57 persen pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan domestik, kondisi permintaan dalam negeri, serta dinamika ekonomi global.

Kebijakan upah minimum merupakan instrumen yang secara langsung bersentuhan dengan distribusi pendapatan, khususnya pada kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah memberikan jaminan penghasilan yang layak, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mengurangi kesenjangan antara pekerja berupah rendah dengan kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi. Mengingat sebagian besar pekerja Indonesia masih berada pada level upah menengah ke bawah, kebijakan upah minimum memiliki potensi besar dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, perbedaan besaran upah minimum antarprovinsi juga menambah dimensi penting untuk dianalisis, karena dapat

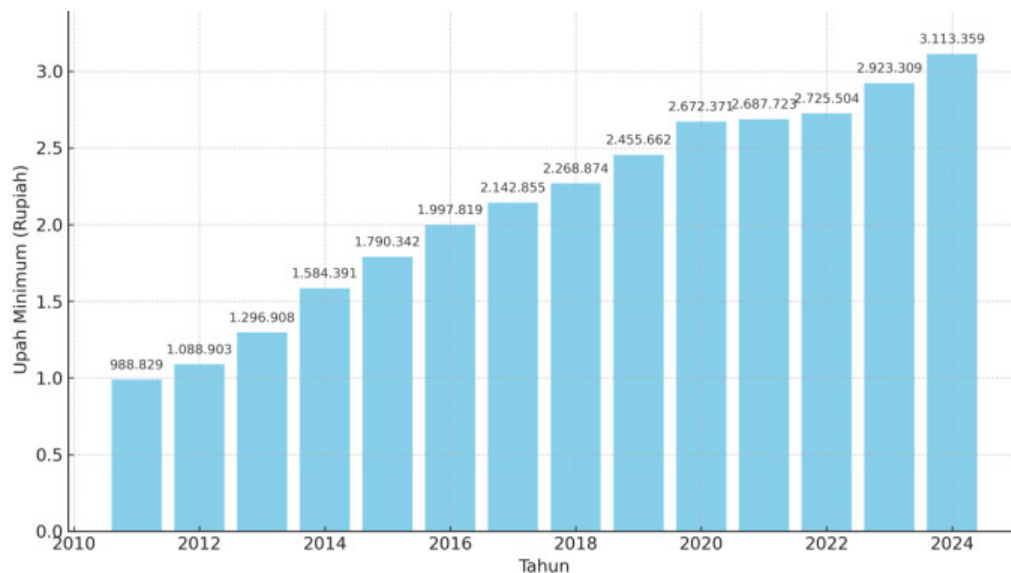
menjelaskan bagaimana kebijakan ini berperan dalam pemerataan pendapatan secara nasional.



Upah Minimum memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Menurut Sumarsono (2014), upah merupakan imbalan atau balas jasa yang diterima atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan sistem pembayaran yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan awal atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan upah minimum bertujuan untuk memastikan pekerja memperoleh upah yang layak sekaligus mencegah kemiskinan di kalangan pekerja, termasuk memenuhi standar kebutuhan hidup layak bagi buruh. Selain itu, pendistribusian kembali pendapatan kepada pekerja berupah rendah dapat mengurangi disparitas upah dan berpotensi meningkatkan permintaan agregat melalui efek pengganda (multiplier effect).

Teori ekonomi neoklasik menyatakan bahwa keberadaan upah minimum justru berpotensi memperbesar, bukan mengurangi ketimpangan pendapatan. Penetapan upah minimum menciptakan intervensi non-pasar dalam menentukan tingkat upah di pasar tenaga kerja, sehingga menjadikan biaya tenaga kerja lebih tinggi. Ketika upah tenaga kerja meningkat akibat kebijakan ini, permintaan terhadap pekerja cenderung menurun, yang pada akhirnya dapat menyebabkan sebagian pekerja kehilangan pekerjaan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4

Upah minimum Indonesia Tahun 2011-2024 (Rupiah)



Berdasarkan Gambar 1.4, terlihat bahwa upah minimum di Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2011 hingga 2024. Pada tahun 2011, upah minimum tercatat sebesar Rp 988.829 dan terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2013 hingga 2015, di mana upah minimum naik dari Rp 1.296.908 menjadi Rp 1.790.342, mencerminkan adanya penyesuaian yang cukup besar terhadap biaya hidup dan inflasi.

Memasuki tahun 2016 hingga 2019, tren kenaikan upah minimum tetap berlanjut dengan pertumbuhan yang relatif stabil, dari Rp 1.997.819 pada tahun 2016 menjadi Rp 2.455.662 pada tahun 2019. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, upah minimum masih mengalami kenaikan menjadi Rp 2.672.371, meskipun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Setelah itu, upah minimum terus meningkat, mencapai Rp 2.725.504 pada tahun 2022, kemudian melonjak menjadi Rp 2.923.309 pada 2023, dan mencapai titik tertinggi pada periode ini sebesar Rp 3.113.359 pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia secara konsisten diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi nasional.

Kenaikan upah minimum tersebut mencerminkan upaya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kesejahteraan pekerja melalui peningkatan standar penghasilan minimum yang layak. Meskipun demikian, tingkat kenaikan upah minimum masih menunjukkan variasi yang tidak merata antar daerah, yang berpotensi menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di antara para pekerja.

Ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, ketimpangan dapat memacu daerah-daerah yang masih tertinggal untuk berupaya meningkatkan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan wilayahnya. Namun, di sisi lain, ketimpangan juga menimbulkan dampak negatif seperti inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, serta dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (Todaro & Smith, 2013).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menghadapi permasalahan ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan nilai indeks gini yang relatif tinggi. Selain itu, pembangunan di



berbagai wilayah di Indonesia masih menunjukkan ketidakmerataan, yang terlihat dari perbedaan capaian pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat upah minimum di berbagai periode. Meskipun perekonomian nasional terus mengalami perkembangan, ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan masih menjadi tantangan serius yang berpotensi menghambat kemajuan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ketimpangan pendapatan dengan judul **“Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :



1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademis mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi sekaligus menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini mendukung pengembangan teori tentang distribusi pendapatan dan dinamika ekonomi dengan memberikan perspektif baru yang dapat memperkuat atau memperbaiki teori-teori yang telah ada.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam membantu pemerintah, pelaku ekonomi, dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar acuan yang membantu peneliti dalam menyusun kerangka tertulis, sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi dan mengarahkan berbagai faktor yang memengaruhi jalannya penelitian.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan yang cukup mencolok di antara kelompok-kelompok masyarakat (Todaro & Smith, 2011). Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi tingkat ketimpangan (disparitas) tersebut.

Tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah memang sering diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita. Namun, peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Banyak negara berkembang justru lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja dalam pembangunan ekonominya. Kondisi ini menyebabkan hasil pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Ketika pendapatan nasional tidak terdistribusi secara merata, ketimpangan pun terjadi, yang pada akhirnya memperlebar jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Menurut Sukirno (2006), distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan konsep yang membahas mengenai bagaimana pendapatan tersebar di antara individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Terdapat dua konsep utama dalam pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan relatif dan ketimpangan absolut. Konsep ketimpangan relatif mengukur distribusi pendapatan dengan membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok tertentu dengan total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, konsep ketimpangan absolut menggunakan parameter dengan nilai mutlak untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan (Sukirno, 2006).



Lebih lanjut, Sukirno menegaskan bahwa distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam permasalahan kemiskinan, karena pada hakikatnya distribusi pendapatan juga menjadi ukuran kemiskinan relatif. Dalam konteks ini, tingkat kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Fenomena inilah yang pada akhirnya memicu ketimpangan pendapatan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan perencanaan yang tepat untuk mengarahkan alokasi investasi, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang di seluruh wilayah dalam suatu negara (Sjafrizal, 2012).

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999).

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan di suatu negara atau wilayah umumnya disebabkan oleh perbedaan dalam potensi dan laju pertumbuhan masing-masing daerah. Pembangunan sering kali terfokus pada wilayah yang telah berkembang, sehingga memperlebar kesenjangan antarwilayah. Hal ini dipengaruhi oleh variasi dalam ketersediaan sumber daya alam, letak geografis, serta faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh tiap daerah. Perbedaan dalam proses pembangunan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan dalam tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

Terdapat dua ukuran yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, yaitu :

- a. **Koefisien Gini**, merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien ini dihitung sebagai rasio antara luas area yang terbentuk antara Kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna. Semakin kecil nilai Koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah. Sebaliknya, semakin besar nilai Koefisien Gini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi



pendapatan yang semakin tinggi. Adapun kriteria tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini menurut Todaro (2011) adalah sebagai berikut :

- Kurang dari 0,35 : ketimpangan rendah
 - Antara 0,35 - 0,5 : ketimpangan sedang
 - Lebih dari 0,5 : ketimpangan tinggi
- b. **Kurva Lorenz**, merupakan sebuah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan dalam suatu populasi. Kurva ini digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan cara memetakan persentase kumulatif penduduk terhadap persentase kumulatif pendapatan yang mereka terima. Jika Kurva Lorenz tidak dapat ditentukan secara langsung, maka pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan menggunakan Koefisien Gini, yang dikembangkan oleh Corrado Gini pada tahun 1912. Kurva Lorenz biasanya diproksikan untuk setiap kelas interval pendapatan, sehingga luas area yang terbentuk antara Kurva Lorenz dan garis pemerataan sempurna dapat diukur menggunakan Koefisien Gini.

Menurut Adelman dan Morris (1973), terdapat delapan faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, antara lain :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi, di mana masyarakat memegang uang tetapi tidak diikuti dengan penambahan produksi barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan wilayah.
4. Banyaknya investasi dalam proyek padat modal (*Capital Intensive*), sehingga tingkat pendapatan modal dari kerja tambahan lebih besar dibandingkan tingkat pendapatan orang yang bekerja, yang dapat memicu meningkatnya pengangguran.
5. Kurangnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.



7. Ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dalam negara maju.
8. Menurunnya produktifitas industri kreatif.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kemajuan suatu wilayah. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui total Produk Domestik Bruto (PDB) wilayah tersebut, yang mencerminkan kontribusi berbagai komponen ekonomi terhadap peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan.

PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis perkembangan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDB menggambarkan nilai bersih dari barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi di wilayah tersebut selama periode waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Sasana, 2006).

PDB dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu PDB berdasarkan harga konstan dan PDB berdasarkan harga berlaku. PDB berdasarkan harga konstan menunjukkan pertambahan nilai barang dan jasa dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai acuan (harga dasar). Sementara itu, PDB berdasarkan harga berlaku menggambarkan pertambahan nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga aktual pada masing-masing tahun.

Berikut ini beberapa manfaat dari perhitungan PDB :

1. Sebagai alat untuk mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu daerah. Hasil perhitungan PDB dapat dimanfaatkan untuk melihat komposisi sektor ekonomi, apakah wilayah tersebut didominasi oleh sektor industri, pertanian, atau jasa, serta mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah.



2. Sebagai alat untuk membandingkan kondisi perekonomian suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Melalui perbandingan PDB dari tahun ke tahun, dapat diperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi, baik berupa kenaikan maupun penurunan aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika tingkat perekonomiannya meningkat atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Sukirno (2006) menyatakan bahwa keberhasilan perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan meningkatnya faktor-faktor produksi dari tahun ke tahun. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Simon Kuznets yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Simon Kuznets memperkenalkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan melalui hipotesis yang dikenal sebagai *Kuznets Curve*. Hipotesis ini menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan mengikuti pola kurva U terbalik sepanjang proses pembangunan ekonomi. Menurut Simon Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan akibat perbedaan produktivitas antar sektor.

Namun, seiring dengan semakin majunya pembangunan, peningkatan pendapatan per kapita, serta kebijakan redistribusi yang lebih efektif, ketimpangan cenderung menurun. Pada tahap ini, distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan struktur sosial ekonomi bergerak menuju masyarakat yang lebih



Tahapan teori :

1) Tahap awal pertumbuhan ekonomi

Pada tahap ini, ekonomi masih didominasi oleh sektor agraris dengan produktivitas yang rendah. Ketika sektor industri mulai berkembang, hanya sebagian kecil populasi yang memiliki akses ke modal dan teknologi, sehingga meningkatkan ketimpangan. Keuntungan dari sektor modern terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Contohnya pada awal industrialisasi di Inggris, pekerja sektor industri menikmati penghasilan lebih tinggi dibandingkan petani. Hal serupa juga terjadi di Indonesia ketika sektor manufaktur berkembang pesat pada 1970-an.

2) Tahap menengah

Ketimpangan mencapai puncaknya ketika peralihan dari sektor agraris ke industri mencapai intensitas tertinggi. Pada titik ini, sektor tradisional dan modern hidup berdampingan, tetapi distribusi pendapatan belum merata karena sektor modern belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

3) Tahap lanjut

Ketimpangan mulai menurun ketika lebih banyak tenaga kerja bergeser ke sektor modern, dan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Kebijakan redistribusi, investasi dalam pendidikan, dan perbaikan teknologi juga berperan penting dalam proses ini.

Todaro dan Smith (2013) mengemukakan bahwa Kurva Kuznets menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang bersifat dinamis seiring waktu. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi cenderung berkorelasi positif dengan ketimpangan, yang berarti peningkatan aktivitas ekonomi awalnya disertai dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang, hubungan tersebut berubah menjadi negatif, di mana pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan justru akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.



ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang secara teoritis sulit dihapuskan sepenuhnya. Menurut Todaro dan Smith (2015), ketimpangan

hanya dapat ditekan hingga tingkat yang dianggap dapat diterima secara sosial, agar tidak mengganggu stabilitas sosial maupun keseimbangan dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktiknya, ketimpangan tidak sepenuhnya dapat dihapuskan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Meskipun demikian, keberadaan ketimpangan dapat menjadi pendorong bagi daerah yang tertinggal untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengejar ketertinggalan dari wilayah lain yang lebih maju. Namun demikian, apabila tingkat ketimpangan pendapatan terlalu tinggi, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di suatu negara. Ketimpangan yang berlebihan kerap dikaitkan dengan peningkatan angka kemiskinan, krisis ekonomi, tingginya tingkat kriminalitas, peningkatan beban utang, dan persoalan lainnya. Lebih lanjut, menurut Todaro dan Smith (2013), ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengakibatkan sejumlah dampak negatif, antara lain :

- 1) Menurunnya inefisiensi ekonomi
- 2) Terganggunya stabilitas sosial serta menurunnya rasa solidaritas antar anggota masyarakat; dan
- 3) Munculnya persepsi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan

Teori Kuznets, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin pada awalnya mengarah pada kemiskinan yang tinggi dikarenakan distribusi pendapatan yang tidak merata. Namun, jika negara miskin terus berkembang, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan dan meratanya distribusi pendapatan. Sementara itu, para ekonom klasik berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung melambat meskipun masih berada pada fase awal. Berdasarkan pengamatan Kuznets terhadap beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, dan China, ia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi justru mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kenyataan sering kali

akan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata di lapisan masyarakat. Sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan



ekonomi terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang sudah mapan, terutama di sektor formal dan urban, sehingga memperbesar kesenjangan dengan kelompok rentan, seperti pekerja informal dan masyarakat pedesaan. Fenomena ini dikenal sebagai *growth without equity*, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan.

2.1.3 Inflasi

Menurut Nopirin (2016), inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Kenaikan harga ini tidak selalu terjadi secara serentak atau dengan persentase yang sama pada setiap jenis barang. Namun, yang menjadi poin utama adalah adanya kecenderungan kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan.

Tingginya laju inflasi dapat meningkatkan ukuran garis kemiskinan, karena harga barang dan jasa menjadi salah satu komponen penentu dalam perhitungan garis kemiskinan. Kenaikan inflasi secara otomatis akan menaikkan garis kemiskinan. Selain itu, melalui proses inflasi yang terus berlangsung, pemerintah secara tidak langsung dapat melakukan redistribusi kekayaan secara tersembunyi, yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mankiw (2009) juga menegaskan bahwa ketika inflasi terus bergulir dan nilai riil mata uang mengalami fluktuasi yang besar, maka kenaikan inflasi akan berimplikasi pada peningkatan batas garis kemiskinan. Akibatnya, jumlah penduduk miskin akan bertambah jika kenaikan inflasi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli atau pendapatan masyarakat, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah.

Secara umum, teori yang membahas tentang inflasi dapat dibagi ke dalam tiga kelompok utama, masing-masing menyoroti aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi.

Boediono (2005) menjelaskan bahwa terdapat tiga teori utama yang mendasari pemahaman tentang inflasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Kuantitas, diperkenalkan oleh Irving Fisher. Menurut pandangan ini, inflasi terjadi sebagai akibat dari peningkatan jumlah uang yang beredar masyarakat serta ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa mendatang. Dengan kata lain, semakin besar jumlah uang yang



beredar tanpa diimbangi dengan peningkatan output, maka harga-harga cenderung naik.

- b. Teori Keynesian, menjelaskan bahwa inflasi disebabkan oleh adanya sebagian masyarakat yang hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Situasi ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi jumlah yang tersedia di pasar. Masyarakat dalam golongan ini cenderung mencari tambahan dana di luar kemampuan ekonominya agar dapat memenuhi berbagai keinginannya, sehingga terjadi tekanan permintaan yang berlebihan (*demand-pull inflation*).
- c. Teori Strukturalis, teori ini menekankan pada ketegaran struktur perekonomian di negara-negara berkembang. Inflasi dalam konteks ini lebih dikaitkan dengan faktor-faktor struktural yang hanya dapat berubah secara gradual dalam jangka panjang. Menurut teori strukturalis, terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab inflasi di negara-negara berkembang, yaitu :
 - Ketidakelastisan penerimaan ekspor, yang membuat pendapatan negara dari sektor ekspor sulit meningkat seiring dengan kenaikan kebutuhan impor.
 - Ketidakelastisan suplai atau produksi bahan makanan di dalam negeri, yang menyebabkan harga pangan sangat rentan mengalami kenaikan ketika terjadi lonjakan permintaan.

Berdasarkan penyebab terjadinya, inflasi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) *Demand-pull inflation*, adalah inflasi yang terjadi akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi ini muncul ketika permintaan agregat meningkat secara signifikan, sedangkan kapasitas produksi ekonomi telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Dalam kondisi ini, kenaikan permintaan tidak lagi mampu mendorong peningkatan output atau produksi, tetapi justru hanya memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa. Fenomena ini disebut juga sebagai *pure inflation*. Kenaikan permintaan yang melebihi Produk Domestik Bruto (PDB) akan menciptakan *inflationary gap*, yang pada akhirnya memicu inflasi.



- 2) *Cost-push inflation*, adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Situasi ini terjadi ketika harga faktor-faktor produksi (seperti upah tenaga kerja, harga bahan baku, atau energi) meningkat, sehingga produsen harus mengurangi tingkat produksi. Penawaran agregat yang menurun akibat tingginya biaya produksi menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga secara umum.
- 3) *Mixed inflation*, merupakan inflasi yang disebabkan oleh kombinasi antara kenaikan permintaan agregat (*demand-pull*) dan kenaikan biaya produksi (*cost-push*). Inflasi campuran ini sering terjadi dalam perekonomian, di mana kedua faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain, sehingga laju inflasi menjadi lebih sulit dikendalikan.

Inflasi memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek, baik dalam skala makroekonomi maupun terhadap individu dan masyarakat. Secara umum, pengaruh inflasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Dampak terhadap perekonomian
 - Inflasi mendorong terjadinya spekulasi dalam penanaman modal, karena pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga.
 - Tingkat suku bunga cenderung meningkat akibat inflasi, yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi.
 - Inflasi dapat menyebabkan defisit pada neraca perdagangan serta meningkatkan jumlah utang luar negeri akibat kenaikan harga impor dan penurunan daya saing produk domestik.
- b) Dampak terhadap individu dan masyarakat
 - Inflasi memperburuk distribusi pendapatan, karena kelompok berpendapatan tetap akan lebih terdampak dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi.
 - Pendapatan riil masyarakat mengalami penurunan, sementara nilai tabungan juga menurun akibat tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa.



ornbusch dan Fischer (2001) menyatakan bahwa inflasi merupakan a ekonomi yang kerap terjadi, meskipun tidak pernah diharapkan

kehadirannya. Inflasi dapat ditemukan di berbagai negara dan selalu menjadi fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah uang yang berlebihan serta kondisi moneter yang tidak stabil.

Tingkat inflasi sendiri dapat dikategorikan ke dalam empat tingkatan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 *Jenis-Jenis Inflasi*

Jenis Inflasi	Nilai Inflasi
Inflasi Ringan	10% atau 20% setahun
Inflasi Sedang	20% s/d 30% setahun
Inflasi Berat	30% s/d 100% setahun
Hiper Inflasi	> 100% setahun

Sumber : BPS

Terdapat tiga komponen utama yang harus terpenuhi agar suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai inflasi, yaitu :

- Terjadi kenaikan harga, yaitu ketika harga suatu komoditas lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Kenaikan harga tersebut harus bersifat umum, artinya terjadi pada sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, bukan hanya pada satu atau dua komoditas tertentu yang tidak memengaruhi harga secara keseluruhan.
- Kenaikan harga tersebut harus berlangsung terus-menerus. Dengan kata lain, kenaikan harga yang bersifat sementara—seperti saat perayaan Lebaran atau Tahun Baru—tidak dapat disebut sebagai inflasi karena tidak memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap kestabilan harga.

Tingkat inflasi diukur menggunakan indeks harga, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai salah satu yang paling umum digunakan. IHK mengukur perubahan harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, transportasi, dan perumahan. Menurut Kristinae (2018), IHK merupakan ukuran anjang dari biaya barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. ederhana, IHK menunjukkan rata-rata perubahan harga dari satu paket



barang dan jasa dalam periode waktu tertentu dengan melacak perubahan harga yang dikonsumsi masyarakat secara rutin.

Selain IHK, terdapat juga Indeks Harga Produsen (IHP) yang mengukur perubahan harga pada tingkat produsen. Pemerintah dan bank sentral biasanya menetapkan target inflasi sebagai bagian dari kebijakan moneter. Misalnya, Bank Indonesia menetapkan target inflasi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Inflasi berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Saat harga barang naik, pendapatan yang tidak berubah nilainya akan kehilangan daya beli sehingga masyarakat hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dibanding sebelumnya.

2.1.4 Upah Minimum

UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar atau acuan minimum dalam pemberian upah bagi tenaga kerja, pegawai, buruh, maupun karyawan di suatu usaha atau lingkungan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan atau pengusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para pekerja menerima upah yang layak, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan.

Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta memastikan mereka memperoleh penghasilan yang layak, dengan tetap mempertimbangkan kemajuan usaha dan tingkat produktivitas (Izzaty, 2013). Di setiap kota/kabupaten atau provinsi, dewan pengupahan akan memberikan rekomendasi mengenai besaran upah minimum. Proses ini melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pekerja, serikat buruh, perguruan tinggi, dan pengusaha. UMP sendiri ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum tanggal satu Januari. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, memberikan imbal hasil yang lebih adil, serta mengurangi ketimpangan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Upah Minimum, kebijakan penetapan upah minimum dimaksudkan langkah untuk menjamin hak pekerja atau buruh dalam memperoleh



kehidupan yang layak secara manusiawi, sekaligus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menjaga stabilitas daya beli.

Upah minimum merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan pekerja menerima upah yang layak dan mencegah kemiskinan di kalangan pekerja, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Waldman & Whalen (2007), upah minimum merupakan faktor penting dalam penetapan upah di tingkat nasional, yang juga berpengaruh terhadap pendapatan. Pekerja di sektor formal menjadi sasaran kebijakan pengupahan minimum. Mereka tidak menerima upah yang lebih rendah dari upah minimum yang sah. Oleh karena itu, upah minimum muncul untuk melindungi pekerja dengan pendapatan rendah hingga sering kali menjadi isu kelas menengah.

Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, bukannya mengurangi. Penetapan upah minimum membuat pemerintah ikut campur dalam menentukan standar upah di pasar tenaga kerja. Berdasarkan asumsi bahwa kenaikan upah akan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan, hal ini akan berimbas pada naiknya harga barang per unit yang diproduksi. Konsumen, pada gilirannya, akan merespon kenaikan harga dengan mengurangi konsumsi atau bahkan menghentikan pembelian barang tersebut. Akibatnya, banyak barang yang tidak terjual, dan produsen terpaksa mengurangi jumlah produksi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan mungkin akan mengurangi tenaga kerja, yang berpotensi menyebabkan penurunan permintaan pekerja dan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel, di mana variabel independen (X) memengaruhi variabel dependen (Y), umumnya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat, yang menggambarkan bagaimana suatu variabel dapat menimbulkan perubahan pada variabel lainnya.

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Peningkatan pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas



ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti terjadinya pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam banyak kasus, hasil pertumbuhan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, khususnya mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, pendidikan, dan teknologi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak otomatis memperbaiki distribusi pendapatan, bahkan berpotensi memperdalam ketimpangan antar kelompok masyarakat.

Pandangan Kuznets Hypothesis menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk kurva-U terbalik. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat karena manfaat pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki faktor produksi. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian dan meluasnya akses kesempatan kerja serta distribusi modal manusia, ketimpangan diharapkan menurun. Kondisi Indonesia mencerminkan fenomena tersebut, di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang tidak selalu diiringi penurunan ketimpangan pendapatan secara konsisten.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan nasional, distribusinya belum merata di semua lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi sering kali memperoleh manfaat lebih besar melalui kepemilikan aset produktif dan akses terhadap peluang investasi. Sebaliknya, kelompok berpendapatan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, maupun modal usaha. Hal ini menyebabkan jurang kesenjangan pendapatan tetap bertahan meskipun perekonomian nasional tumbuh.

2.2.2 Hubungan Inflasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang terkendali menunjukkan bahwa harga-harga barang dan jasa relatif stabil sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Namun, inflasi yang tinggi tidak selalu membawa dampak yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah



biasanya lebih terdampak karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan kelompok berpenghasilan tinggi relatif lebih terlindungi karena memiliki aset dan sumber pendapatan yang nilainya dapat menyesuaikan dengan kenaikan harga. Kondisi ini menyebabkan inflasi yang tinggi justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan.

Menurut teori Purchasing Power (teori daya beli), inflasi secara langsung memengaruhi distribusi pendapatan karena mengurangi nilai riil pendapatan yang diterima masyarakat. Mereka yang berpendapatan tetap, seperti pekerja dengan gaji rendah atau buruh, mengalami penurunan daya beli yang lebih besar dibandingkan kelompok kaya yang memiliki kemampuan diversifikasi aset. Akibatnya, inflasi cenderung memperburuk kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Selain itu, pandangan Cost of Living Theory menjelaskan bahwa inflasi meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan, tetapi dampaknya tidak merata. Di Indonesia, inflasi pada sektor pangan dan energi sering kali lebih signifikan dibandingkan sektor lainnya. Karena komoditas ini memiliki proporsi besar dalam konsumsi rumah tangga miskin, maka kenaikan harga pangan dan energi lebih memperburuk kondisi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, kelompok berpendapatan tinggi masih memiliki cadangan keuangan atau instrumen investasi yang mampu melindungi mereka dari dampak inflasi.

Dengan demikian, hubungan antara inflasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat memperbesar jurang kesenjangan. Hal ini terjadi karena beban inflasi lebih berat ditanggung oleh masyarakat miskin, sementara kelompok kaya cenderung lebih mampu beradaptasi. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas inflasi, khususnya pada sektor kebutuhan pokok, menjadi salah satu langkah penting untuk menekan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan

Upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan kerjaan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, khususnya mereka penghasilan rendah, agar dapat memperoleh pendapatan yang layak



sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Kenaikan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan antara pekerja dengan pengusaha. Namun, kebijakan upah minimum tidak selalu membawa dampak yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dan sektor perekonomian. Dalam praktiknya, penetapan upah minimum sering kali menimbulkan perdebatan karena implikasinya dapat berbeda bagi pekerja, pengusaha, maupun struktur pasar tenaga kerja secara keseluruhan.

Menurut teori neoklasik, upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat keseimbangan pasar tenaga kerja dapat menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran, karena jumlah pekerja yang bersedia bekerja melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta pengusaha pada tingkat upah tersebut. Kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan pendapatan, karena sebagian pekerja memang memperoleh peningkatan pendapatan, tetapi sebagian lainnya justru kehilangan kesempatan kerja. Dengan demikian, manfaat kebijakan upah minimum cenderung tidak merata dan bahkan berpotensi menimbulkan distribusi pendapatan yang semakin timpang.

Selain itu, pandangan teori dualisme pasar tenaga kerja menjelaskan bahwa upah minimum lebih banyak berpengaruh pada sektor formal dibandingkan sektor informal. Pekerja di sektor formal yang terlindungi kebijakan upah minimum memperoleh peningkatan kesejahteraan, sementara pekerja di sektor informal yang jumlahnya cukup besar di Indonesia tetap berada dalam kondisi pendapatan rendah. Hal ini menciptakan kesenjangan baru antara pekerja sektor formal dan informal, sehingga secara agregat dapat memperlebar ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, hubungan antara upah minimum dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki efek ganda. Di satu sisi, upah minimum berpotensi mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pendapatan kelompok pekerja berupah rendah. Namun di sisi lain, jika penerapannya tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, upah minimum justru dapat memperburuk ketimpangan karena ng pengangguran dan memperlebar jurang antara pekerja sektor formal nal.



2.3 Studi Empiris

Mansyur, Nursini, dan Hamrullah (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Murtala (2020) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh” menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 0,41. Hasil analisis juga mengungkapkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat ekonomi, tingkat pengangguran, dan angka aglomerasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, angka partisipasi kasar memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.

Istiqamah, Syaparuddin, dan Rahmadi (2018) dalam penelitiannya dengan hasil analisis menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan maupun mengurangi jumlah penduduk miskin.

Caesarisma (2023) dalam penelitiannya dengan hasil analisis menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Arif dan Wicaksani (2017) dalam penelitiannya dengan menggunakan empat variabel independen yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan penduduk. Menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan



terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif.

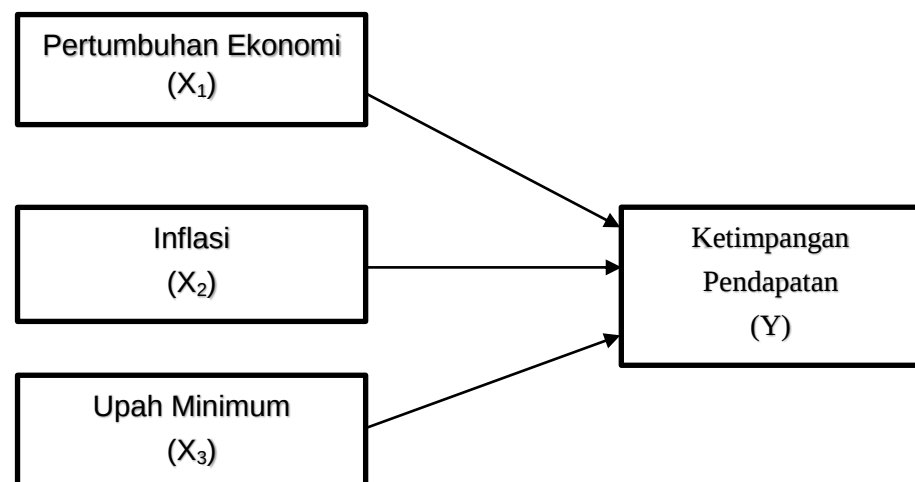
Wijayanti dan Aisyah (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi asing, inflasi, dan *trade openness* terhadap ketimpangan di Indonesia tahun 2000-2020. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari World Bank dengan metode regresi Ordinary Least Square (OLS) untuk dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi asing secara positif berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sementara keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif, dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan.

2.4 Kerangka Konseptual/Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menyusun sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara tiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum terhadap variabel dependen, yaitu ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Oleh karena itu, hubungan antar variabel tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian ini, yang secara spesifik mengkaji bagaimana ketiga faktor tersebut berperan dalam membentuk ketimpangan pendapatan di Indonesia.





Gambar 2. 2

Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual pada **Gambar 2.2** maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Diduga inflasi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Diduga upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

